

AKTUALISASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA

Muhammed Nabil Ghulam Marzouk Nour El Ein ¹, Rizky Ainur Ridho ², Roihana Lathifatunnabila ³, Refida Muflichuna Suliyono ⁴, Dr. Ari Metalin Ika Puspita, M.Pd ⁵
Universitas Negeri Surabaya

Email : muhammed.23165@mhs.unesa.ac.id ¹; risky.23163@mhs.unesa.ac.id ²;
roihana.23155@mhs.unesa.ac.id ³; refida.23154@mhs.unesa.ac.id ⁴;
aripuspita@unesa.ac.id ⁵

Abstrak

Seiring berjalannya waktu, tatanan kehidupan global mengalami perubahan yang secara langsung mempengaruhi cara hidup suatu negara. Kajian ini juga memunculkan gagasan tentang pentingnya ideologi Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Penulis penelitian menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan, mengkaji berbagai sumber dari majalah, buku, dan artikel ilmiah, kemudian menganalisisnya secara mendalam dan menarik kesimpulan akhir. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai tantangan dan ancaman yang terjadi saat ini dan mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dihadapi dengan menyikapinya dengan tegas menaati nilai-nilai luhur Pancasila. Meninjau kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mempertimbangkan rasionalitas dan realisasinya untuk mengatasi permasalahan modern merupakan salah satu cara mewujudkannya oleh bangsa dan masyarakat Indonesia.

Kata kunci: Aktualisasi, Nilai Pancasila, Berbangsa dan Bernegara

ACTUALIZATION OF PANCASILA IN THE LIFE OF INDONESIAN SOCIETY

Abstract

Over time, the global order of life undergoes changes that directly affect a country's way of life. This study also raises the idea of the importance of the Pancasila ideology as a guide in the life of Indonesian society, nation and state. The research author uses a qualitative method with library research, examining various sources from magazines, books, and scientific articles, then analyzing them in depth and drawing final conclusions. The results of this study show that the various challenges and threats that occur today and affect the life of society, nation and state must be faced by responding to them by firmly adhering to the noble values of Pancasila. Revisiting the noble values of Pancasila by considering its rationality and realization to overcome modern problems is one way to realize it by the Indonesian nation and society.

Keywords: Actualization, Pancasila Value, Nationship, Citizenship

PENDAHULUAN

Terwujudnya nilai, norma, dan etika suatu bangsa merupakan faktor penting berupa tercapainya pemahaman nilai, norma, dan etika melalui tindakan dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat. Perwujudan Pancasila dilakukan melalui pengembangan nilai, norma, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya: standar hukum dan etika negara dan bangsa. Tentang penyelenggaraan dalam masyarakat, bangsa, dan negara, termasuk seluruh aspek penyelenggaraan negara. Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam, suku, agama, kepercayaan, hubungan dan budaya yang sangat kompleks dan beragam (Saputra, 2017; Nurcayono, 2018: 106). Keberagaman tersebut tercipta karena keadaan masyarakat Indonesia yang mempunyai persamaan dan perbedaan dalam pemaknaan setiap karakternya. Hal ini terbentuk atas dasar kesamaan budaya atas nama etnis, agama dan faktor biologis yang menjadi ciri khas dan berbeda dari masing-masing kelompok (Kymlicka, 2003: 4). Dengan demikian, kehidupan sosial yang tercipta dari persamaan dan perbedaan tersebut pada akhirnya menjadi sentral gerakan yang mewujudkan simbol persatuan dan kesatuan yang dituangkan dalam Pancasila.

Keberagaman suku dan bangsa yang ada di Indonesia tidak lepas dari perubahan kondisi seiring berjalannya waktu. Hal ini ditandai dengan perkembangan pada zaman dahulu yang memunculkan keberagaman tertentu (Rozikin, 2019: 2016). Nilai-nilai tersebut bersumber dari budaya luhur, memperkokoh jati diri bangsa Indonesia dan diwujudkan melalui sikap hormat, sopan santun dan gotong royong (Sacipto, 2018). Namun di era revolusi industri saat ini, keberagaman masyarakat mengalami perubahan yang sangat besar dan berdampak pada seluruh bidang dan tatanan kehidupan, termasuk kecanggihan teknologi digital, tatanan bangsa dan masyarakat (Lonto, 2019; Maharani dkk, 2019: 277). Hal ini ditandai dengan perubahan psikologi manusia menjadi semakin egois, gaya hidup yang mudah dan cepat, komunikasi satu sama lain, aktivitas hidup manusia menjadi semakin mudah dan nyaman, perilaku manusia menjadi semakin mudah dan nyaman. rasa saling percaya, penyebaran hoax, dan pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai luhur semakin menurun. Saat ini kita sering menyaksikan fenomena intoleransi politik dengan menggunakan isu suku, agama, kepentingan, dan antargolongan (SARA) (Budiwibowo, 2016). Belum lagi munculnya kemerosotan moral yang berujung pada kemerosotan moral elite nasional serta pengkhianatan terhadap Pancasila sehingga menimbulkan eksklusivisme kelompok, kurangnya pemahaman terhadap kesenjangan pembangunan, dan merebaknya kejahatan korupsi di setiap cabang kekuasaan dan sistem politik. berdasarkan link primitivisme semakin populer dan tindakan - Banyak provokasi melalui jejaring

sosial di berbagai berita, baik di media cetak, radio, maupun di media televisi (Winarno dan Raharjo, 2018). Oleh karena itu, bangsa perlu menjelaskan pembentukan nilai dan norma, memulihkan, melaksanakan, memasyarakatkan, mendidik bahkan membudayakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kewajiban Bersama dan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah (Huda, 2018: 2). Pemerintah sebagai wakil rakyat tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dengan hanya sekedar membantu dan mendampingi lembaga legislatif atau yudikatif dalam rangka pemajuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masyarakat sebagai anggota pelaksana juga tidak boleh turun tangan. tanggung jawabnya untuk menjaga ketergantungan pada Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Anggusti, 2019: 3).

Sebenarnya ungkapan cinta Pancasila dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk yang secara resmi tertuang dalam setiap peraturan. Pancasila dapat dimasukkan dalam setiap pelajaran sekolah. Keteladanan guru dan terciptanya wadah untuk lebih mengintegrasikan Pancasila dalam kerangka sistem sosial (Latif, 2018). Ungkapan sistem sosial tersebut dapat diwujudkan dalam kerangka sistem nilai, sistem sosial, dan wujud material, baik dalam budaya maupun kehidupan bermasyarakat (Kaelan, 2013). Salah satunya dapat dijadikan sarana yang tepat untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai agama, nasionalisme, gotong royong, kemandirian dan diskusi berdasarkan Pancasila (Koran Sindo, 2019). Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu benda, bukan objeknya sendiri (Kaelan, 2002, 123). Pokok bahasan dalam hal ini adalah Pancasila. Dengan demikian, Pancasila mengandung nilai berkat sifat atau sifat yang melekat pada Pancasila itu sendiri (Sudjana, 2018: 136).

Butir-butir dalam Pancasila mempunyai bobot yang berbeda-beda namun tidak saling bertentangan. Pernyataan ini juga didukung oleh pandangan Max Scheler bahwa nilai-nilai yang berlaku saat ini tidak akan mulia dan mulia itu (Kaelan, 2002: 124). Padahal, nilai-nilai yang terkandung dalam sila I-V Pancasila merupakan cita-cita, harapan, cita-cita dan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam kehidupannya. Perkembangan nilai-nilai Pancasila dikaitkan dengan sifat atau kualitas kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebagai penghuni bumi, manusia harus berperan sebagai penguasa yang bertanggung jawab di muka bumi ini dengan tugas mengelola dan melindunginya. Namun ironisnya, manusia seringkali menjadi penyebab kerusakan fisik lingkungan

dan hilangnya banyak bentuk kehidupan yang berharga. Di era teknologi yang berkembang pesat saat ini, banyak masyarakat yang mengalami degradasi moral akibat dampak negatif globalisasi. Contohnya adalah semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba, kecanduan narkoba semakin banyak terjadi di semua lapisan masyarakat sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk menangani permasalahan tersebut. Generasi muda terlibat dalam penggunaan obat-obatan terlarang, dan semakin canggihnya akses terhadap dunia digital memudahkan para pengedar narkoba untuk memikat dan menguntit remaja.

Di sisi lain, tindakan yang mengabaikan nilai-nilai luhur seperti pergaulan bebas atau kebebasan seksual juga sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Saat ini, semakin banyak remaja putri yang lebih takut hamil di luar nikah dibandingkan tertular penyakit menular seksual sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Orang tua semakin kehilangan kendali terhadap anak-anak mereka dan semakin banyak generasi muda yang melanggar norma dan hukum sosial tanpa menunjukkan penyesalan. Kemudahan akses terhadap internet dan jejaring sosial juga menimbulkan dampak negatif lain dari globalisasi: banyak generasi muda yang terpengaruh dan menjadi konsumen industri siber, sementara kreativitas positifnya berkurang.

Perdebatan mengenai visi kebangsaan sangatlah penting dan harus dilakukan secara berkala sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila muncul sebagai jembatan untuk membangun visi nasional tersebut. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman hidup masyarakat Indonesia tetapi juga ideologi negara. Sayangnya nilai-nilai Pancasila mulai kehilangan daya tariknya dan tergantikan oleh budaya asing yang didorong oleh gelombang globalisasi. Pancasila benar-benar telah membangun dan mengadaptasi nilai-nilai agar sesuai dengan adat dan budaya Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu generasi muda memahami dan mendapatkan kembali akar budaya dan identitas bangsa yang mulai terlupakan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak nilai-nilai Pancasila yang dapat diterapkan untuk memantapkan visi kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui penelitian ini diharapkan generasi muda mampu menemukan jati dirinya dan mencintai budaya Indonesia sendiri. Visi nasional memegang peranan penting dalam kelangsungan hidup negara. Negara yang mempunyai rasa nasionalisme yang kuat akan lebih mampu mempertahankan eksistensinya dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Sebaliknya, negara yang kehilangan semangat dan

kecerdasan nasional akan terancam kelangsungan hidupnya. Indonesia dengan beragam suku, budaya dan agama mempunyai ciri khas tersendiri. Dalam konteks ini, nilai-nilai nasionalisme, antara lain Pancasila, UUD 1945, dan semboyan negara “Bhinneka Tunggal Ika”, memegang peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

METODE

Fenomena yang terjadi di masyarakat Indonesia ini tidak lepas dari berbagai permasalahan seperti ekstremisme, penyalahgunaan narkoba, merosotnya nilai-nilai kemanusiaan (kejujuran, kebaikan digantikan arogansi, ketidakpedulian, dan lain-lain), serta ketidakpuasan nasional menghadapi situasi tersebut. Kebuntuan komunikasi berbagai pihak di Indonesia, lemah atau tidaknya daya saing lulusan perguruan tinggi Indonesia dalam persaingan Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) dan globalisasi.

Krisnamukti (2020) berpendapat bahwa hendaknya seluruh struktur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menjadikan Pancasila sebagai landasan moral atau norma dan tolok ukur benar, salah, benar dan salah dalam sikap, perbuatan dan tindakan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain dipahami, nilai-nilai tersebut sebagaimana telah disebutkan, juga harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Sebagai pemutakhiran nilai dan norma Pancasila, perlu dikembangkan pedoman sederhana dan praktis yang menjadi landasan pelaksanaan nilai dan norma Pancasila. Pedoman yang berbentuk butir-butir Pancasila ini merupakan penjabaran dari Pedoman Penghayatan dan Penghayatan Pancasila (P4). P4 memiliki 36 butir Pancasila. Namun produk hukum ini telah dilaksanakan sejak Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003. Dari 36 butir Pancasila, dikembangkan lebih lanjut di BP7 hingga mencapai 45 butir Pancasila.

Pedoman Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dirinci dalam 45 Butir Pancasila dan dimaksudkan untuk membantu Anda dalam menghayati nilai-nilai Pancasila dengan lebih mudah dan konkrit. Hal ini diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi perubahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat Indonesia membutuhkan ilmu dan pemahaman agar dapat mengamalkan pokok-pokok Pancasila dalam kehidupan

sehari-hari. Salah satu langkah konkrit yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung masyarakat Indonesia adalah dengan memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam materi sekolah dalam sistem pendidikan negara.

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mencari data/informasi guna mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional dan negara dalam perspektif nilai-nilai inti Pancasila sebagai ideologi dan landasan bangsa Indonesia. Mengetahui nilai-nilai dasar Pancasila sebagai asas dan pedoman hidup bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta mengambil keputusan-keputusan yang tepat yang menjadi landasan dalam menyikapi dan memberikan permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai solusi nilai-nilai Pancasila yang dapat dijalankan, maka perlu adanya rasa tanggung jawab, kasih sayang, keikhlasan, kerjasama, menghargai pendapat, dan cinta tanah air dalam mengamalkan dan menjaga nilai-nilai tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Aktualisasi Nilai Pancasila dalam Kerangka Teoritik

Tujuan dimasukkannya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk dijadikan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dasar pengaturan kegiatan pemerintahan di Indonesia. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa, karena unsur-unsurnya telah hadir dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Oleh karena itu, Pancasila adalah visi hidup atau falsafah hidup bangsa, dan sekaligus tujuan hidup bangsa Indonesia. Dari pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang kemudian tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan jelas dinyatakan sebagai ideologi dasar bangsa Indonesia, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar. mengatur dan mengurus ketatanegaraan Indonesia. Pancasila dalam kedudukan ini sering dianggap sebagai landasan filosofis atau landasan filsafat negara (*philosophische Grondslag*) negara, ideologi negara atau *staatsidee*. Dalam pengertian ini Pancasila merupakan nilai dasar dan standar penyelenggaraan pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila adalah dasar penyelenggaraan ketatanegaraan. Oleh karena itu, seluruh kegiatan penyelenggaraan negara dan penegakan hukum, khususnya seluruh peraturan perundang-undangan, termasuk proses reformasi yang sedang berlangsung di segala bidang, digambarkan bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, Pancasila adalah sumber peraturan hukum negara yang mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia

menurut konstitusi dan seluruh komponennya yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan negara.

Kemampuan ideologi untuk mempengaruhi dan beradaptasi dengan pembangunan sosial. Mempengaruhi berarti berpartisipasi dalam evolusi zaman kita tanpa kehilangan identitas ideologi yang tercermin dalam nilai-nilai yang mendasarinya. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila bukan hanya hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang saja, namun Pancasila mengedepankan nilai-nilai adat, nilai budaya, dan nilai agama yang telah menjadi pandangan hidup masyarakat. pembentukannya. Bangsa. Pancasila sebagai ideologi nasional melampaui keyakinan individu, kolektif, etnis, kebangsaan, dan agama. Oleh karena itu, semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya (Asmaroini, 2017).

Laporan (Damanhuri, 2016) mengatakan Pancasila penting sebagai acuan dan pedoman bagaimana warga negara dapat berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat, atau sering kita sebut dengan good citizen. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diharapkan masyarakat dapat mengetahui cara berpikir dan berperilaku sesuai dengan ideologi bangsa sehingga tercipta kehidupan yang positif. siklus persalinan. bertentangan dengan nilai dan standar. Menurut (Alim, 2011), perwujudan Pancasila dapat dilakukan dengan mengedepankan semangat kebangsaan yang kuat, misalnya semangat cinta terhadap produk nasional. Serap dan amalkan nilai-nilai Pancasila sebaik mungkin. Menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Mengakui supremasi hukum, melaksanakan dan menegakkan hukum dalam arti yang paling benar dan adil. Selektif terhadap pengaruh globalisasi dalam bidang politik, ideologi, ekonomi, budaya, dan sosial bangsa. Di era globalisasi, standar nilai budaya dan sosial masyarakat global turut mempengaruhi eksistensi dan karakter negara lain, khususnya masyarakat Indonesia. Sebagai bahan asal usul, Pancasila telah mewarisi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Meninjau kembali nilai-nilai luhur Pancasila dengan mempertimbangkan rasionalitas dan realisasinya untuk mengatasi permasalahan modern merupakan salah satu cara pemutakhiran Pancasila di era globalisasi.

Globalisasi kini telah merambah ke seluruh aspek penting kehidupan dan menimbulkan tantangan serta permasalahan baru yang perlu diatasi dan diselesaikan agar globalisasi dapat memetik manfaat bagi kemaslahatan kehidupan.

Meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perubahan tatanan kehidupan internasional yang secara langsung berdampak pada perubahan di banyak negara. Pancasila sebagai ideologi negara juga dijadikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Indonesia mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesadaran nasional serta ketahanan spiritual dan ideologi bangsa Indonesia. Terdapat kebutuhan untuk memperkuat kapasitas untuk mengatasi tantangan-tantangan mendasar yang akan mempengaruhi kehidupan politik, sosial dan nasional. Tantangan yang saat ini terjadi yang berpengaruh pada kehidupan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu dihadapi dengan bagaimana cara untuk menyikapi fenomena globalisasi dengan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur Pancasila. Ancaman nyata yang sedang dihadapi saat ini adalah munculnya gerakan-gerakan militan, memecah-belah kesatuan memakai isu SARA oleh pihak-pihak asing, menebarkan informasi hoax ke berbagai sosial media, dan perilaku - perilaku provokasi publik. Tantangan aktualisasi pancasila di era globalisasi dapat membahayakan keberadaan ideologi bangsa, dan saat ini Indonesia berada di tengah-tengah arus globalisasi. Namun, perlu diingat bahwa bangsa Indonesia tidak boleh kehilangan jati dirinya meskipun hidup di tengah-tengah perubahan dunia. Maka Pancasila berperan sebagai benteng dalam tantangan-tantangan di era globalisasi saat ini. Berbagai tantangan dan ancaman tersebut dapat diatasi dengan bertindak dan berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila yaitu hierarki dan saling ketergantungan. Alfred North Whitehead (1864-1947), seorang tokoh filsafat proses, meyakini bahwa semua realitas di alam mengalami proses atau perubahan, khususnya kemajuan, kreativitas, dan kebaruan. Realitas bersifat dinamis dan merupakan proses "menjadi" yang berkesinambungan, meskipun unsur permanen realitas dan identitas diri dalam perubahan tidak boleh diabaikan. Sifat alamiah ini juga dapat diterapkan pada ideologi Pancasila sebagai praktik. Pertanyaannya bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara? Dan unsur nilai-nilai Pancasila apa yang harus kita pertahankan agar tidak berubah? Moerdiono (1995/1996) menunjukkan ada tiga tingkatan nilai dalam ideologi Pancasila. Ketiga tingkat nilai tersebut adalah:

Pertama, nilai-nilai inti. Nilai-nilai fundamental merupakan prinsip yang sangat abstrak, sangat umum, tidak terikat oleh waktu dan tempat, serta mempunyai kandungan kebenaran seperti aksioma. Dari segi kandungan nilai, nilai dasar merujuk pada keberadaan sesuatu termasuk cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri-cirinya. Nilai-nilai inti Pancasila ditetapkan oleh para pendiri negara. Nilai-nilai inti Pancasila bersumber baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang tidak membahagiakan rakyatnya, maupun cita-cita yang

terkandung dalam agama dan tradisi masyarakat adil makmur yang dilandasi solidaritas, solidaritas dan persatuan. dari semua warga negara.

Kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental merupakan pemaparan secara rinci tentang nilai-nilai dasar tersebut, yang merupakan arah kegiatan dalam jangka waktu tertentu dan dalam kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental tersebut harus mengacu pada nilai-nilai mendasar yang telah diuraikan. Konstruksi tersebut dapat dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk-bentuk baru untuk mencapai semangat yang sama, dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh nilai-nilai fundamental tersebut. Menurut kandungan nilai, nilai instrumental adalah kebijakan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program bahkan proyek yang mengikuti nilai-nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai-nilai instrumental tersebut adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, nilai aktual. Nilai-nilai praktis adalah nilai-nilai yang terkandung dalam realitas sehari-hari, berupa bagaimana masyarakat mewujudkan (menyadari) nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai praktis dapat ditemukan dalam berbagai bentuk atau penerapan nilai Pancasila, baik tertulis maupun tidak tertulis, oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, oleh lembaga kekuasaan sosial politik, oleh organisasi masyarakat, oleh organisasi ekonomi, oleh tokoh masyarakat. bahkan oleh warga negara secara individu. Dari segi isi, nilai praktis merupakan arena antara idealisme dan realisme.

Dari segi perwujudan nilai-nilai yang dihormati, sebenarnya nilai-nilai praktislah yang menentukan dihormati atau tidaknya nilai-nilai fundamental dan instrumental. Singkatnya, bukan hanya rumusan abstrak, bahkan kebijakan, strategi, rencana, program atau proyek saja yang menjadi landasan akhir dari nilai-nilai yang dianut, namun juga kualitas pelaksanaannya dalam praktik. Bagi sebuah ideologi, yang terpenting adalah bukti pengalaman atau realisasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Suatu ideologi dapat mempunyai rumusan yang sangat ideal dengan modifikasi yang sangat logis dan koheren pada tataran nilai fundamental dan instrumental. Namun dari segi nilai praktisnya, formula ini tidak bisa kehilangan kredibilitasnya. Bahkan Moerdiono (1995/1996: 15) mengemukakan bahwa tantangan terbesar bagi sebuah ideologi adalah menjaga koherensi antara nilai fundamentalnya, nilai instrumentalnya, dan nilai praktisnya. Tentu saja, jika konsistensi ketiga nilai tersebut bisa dijaga maka ideologi tersebut tidak akan ada masalah. Permasalahan baru muncul jika terjadi inkonsistensi antara ketiga tingkatan nilai tersebut.

Untuk menjaga konsistensi dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dilakukan transformasi Pancasila yang resmi, yang bersifat abstrak, umum, dan universal, menjadi kesadaran umum masyarakat. dan Pancasila kolektif bahkan Pancasila individu tertentu (Suwarno, 1993: 108). Artinya Pancasila menjadi ciri khas perilaku kelompok dan individu, sehingga menjadi motivasi bagi segala perilaku dalam lingkungan aktualnya baik dalam ranah bernegara, politik, maupun individu.

Driyarkara menjelaskan proses penerapan ideologi Pancasila, dengan memaparkan gerakan yang mentransformasikan wujud Pancasila dari kategori tematik (berupa konsep dan teori) menjadi kategori imperatif (berupa norma) dan menjadi operasional. Kategori (dalam bentuk praktek hidup). Peralihan itu lancar asalkan tidak terjadi penyimpangan atau penyimpangan baik berupa pemotongan, penambahan maupun penggantian (Suwarno, 1993: 110-111). Operasionalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus diupayakan secara kreatif dan dinamis, karena Pancasila sebagai ideologi bersifat futuristik. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang dicita-citakan dan ingin dicapai oleh masyarakat.

Permasalahan perwujudan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila dalam praktik kehidupan bermasyarakat dan bernegara bukanlah perkara sederhana. Soedjati Djihadono (1995:2-3) mengemukakan bahwa masih terdapat kelemahan mendasar dalam pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap Negara Pancasila dalam berbagai aspeknya. Jika tidak tepat untuk menampilkan berbagai konsep dan makna sebagai hal yang "sakral" dan tabu, maka hal tersebut seolah-olah sudah begitu jelas dan mutlak kebenarannya, lengkap dan sempurna, sehingga tidak dapat ditunda lagi. Sikap seperti ini menyebabkan berbagai konsep dan pemahaman menjadi kaku, kaku, kurang berkembang dan berisiko ketinggalan zaman. Meskipun benar ada prinsip fundamental tertentu yang mempunyai nilai kekal dan kekal. Belum teraktualisasinya nilai dasar Pancasila secara konsisten dalam tataran praksis perlu terus menerus diadakan perubahan, baik dalam arti konseptual maupun operasional. Banyak hal yang harus ditinjau kembali dan dikaji ulang. Dari beberapa mungkin perlu diubah, beberapa lagi mungkin perlu dikembangkan lebih lanjut dan dijelaskan atau diperjelas, dan beberapa lagi mungkin perlu ditinggalkan.

Pemutakhiran nilai-nilai Pancasila harus selalu inovatif. Hakikat inovasi adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Dengan kata lain, inovasi mengandaikan adanya dinamika dalam Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan teori Aristoteles, Pancasila sebagai suatu kesatuan (realitas) mengandung potensi, khususnya landasan kemungkinan (dinamis). Potensi dalam

pengertian ini adalah kemampuan nyata subjek (dalam hal ini Pancasila) untuk berubah. Subjeknya sendiri berubah dari dalam. Mirip dengan teori A. N. Whitehead, setiap kesatuan nyata (seperti suatu tindakan, termasuk Pancasila) mengandung kemungkinan adanya perubahan. Ini bukanlah kemungkinan yang sepenuhnya logis atau kemungkinan obyektif, seperti halnya batu yang dapat bergerak atau pohon yang dapat ditebang. Bagi Whitehead, setiap unit realitas sebenarnya merupakan sumber daya untuk proses penjelmaan selanjutnya. Jika menyangkut perwujudan nilai-nilai Pancasila, maka pada hakikatnya setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di setiap tingkatan, sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila (pengalihan topik kategori ke dalam kategori wajib), harus terbuka untuk pemeriksaan, evaluasi atau penelitian. kaitannya dengan nilai-nilai inti Pancasila.

Untuk melihat transformasi Pancasila menjadi norma kehidupan sehari-hari dalam suatu Negara, maka harus menganalisis tulisan sila ke-4 yang berkaitan dengan Negara, yang meliputi daerah, warga negara, dan izin pemerintah yang berdaulat. Lebih lanjut, untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa harus menganalisis ketentuan sila ketiga yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, yang meliputi unsur integrasi dan upaya mewujudkan persatuan Indonesia. Sedangkan untuk memahami transformasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat harus menganalisis pasal-pasal sila 1, 2 dan 5 yang berkaitan dengan kehidupan beragama, humanistik, dan sosial ekonomi (Suwarno, 1993:126).

1.2. Perubahan dan Pembaharuan

Lebih lanjut Hamidi (2010: 55-51) menyatakan bahwa nilai-nilai inti yang terkandung dalam Pancasila meliputi lima nilai inti yaitu kesakralan, humanistik, solidaritas, demokrasi dan keadilan. Makna yang terkandung dalam sila pertama meliputi keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kerukunan hidup beragama dan kebebasan beragama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua antara lain meliputi kemanusiaan, pengakuan harkat dan martabat manusia, dan perlakuan adil terhadap sesama manusia. Kemudian pada sila ketiga terkait persatuan bangsa yang meliputi nilai solidaritas dan pengakuan terhadap perbedaan yang ada. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, yaitu kedaulatan, pertimbangan. Selanjutnya sila kelima mengandung nilai keadilan sosial yang dapat dipahami sebagai upaya mengembangkan diri sesuai dengan prinsip Pancasila, kekeluargaan, cinta kemajuan dan pembangunan.

Pembinaan Pancasila bertujuan untuk mengetahui penerapan langsung nilai-nilai Pancasila guna mewujudkan masyarakat yang beretika baik dan diyakini mampu membentuk perilaku masyarakat Indonesia pada umumnya dan Pancasila. Karena pada dasarnya sikap Pancasila akan membawa perubahan pada kepribadian warga negara Indonesia, khususnya generasi muda penerus negara, sehingga mampu menyaring perubahan dan budaya yang masuk dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan bagian dari jati diri bangsa Indonesia yang ada sejak zaman penjajahan hingga Indonesia merdeka. Hal ini dapat ditunjukkan secara praktis dengan menguasai pengetahuan kewarganegaraan, kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan mengikuti berbagai kegiatan positif yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia (Raharjo dkk, 2017). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya memuat nilai-nilai budaya nasional tetapi juga menjadi sumber hukum dan ideologi nasional. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga harus dijelaskan dalam kaitannya dengan standar moral, standar pembangunan, standar hukum dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara (Adi, 2016).

Pancasila yang akan menjadi landasan seluruh proses penyelenggaraan negara di berbagai bidang akan menjadi acuan seluruh rakyat Indonesia, dan Pancasila akan memberikan kriteria yang jelas bagi kesesuaian sikap seluruh warga negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. dan Negara (Kariyadi, 2017). Nilai-nilai yang dikembangkan, khususnya nilai-nilai besar pertama, adalah: nilai keagamaan atau ketuhanan; Nilai kedua berkaitan dengan toleransi; Nilai ketiga dikaitkan dengan kesatuan; Nilai keempat menyangkut pertimbangan dan nilai; dan kelima tentang keadilan sosial. Nilai pertama dikembangkan dengan adanya keberagaman agama yang ada, tidak menjadikan warga desa saling bermusuhan namun sebaliknya bisa hidup bersama. tidak ada perselisihan atau kecemburuan terhadap fasilitas yang diperoleh. Selain tempat ibadah yang letaknya hampir bersebelahan, wujud nilai keharmonisan sila pertama juga ditunjukkan pada pengembangan nilai kedua, terkait toleransi. Hal ini dibuktikan dengan adanya kuburan orang-orang yang berbeda agama namun ditempatkan bersebelahan di tempat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa apapun bentuk kehidupan suatu masyarakat, dapat hidup berdampingan secara harmonis. Perwujudan sila kedua yaitu toleransi juga diwujudkan dalam perayaan hari raya bersama oleh umat beragama lain. Ketika umat Islam merayakan Idul Fitri dan Idul Adha, maka non-Muslim akan mengunjunginya, bersilaturahmi, dan juga menerima sebagian hewan kurban pada Idul Adha. Begitu pula jika ada komunitas non-Muslim yang

merayakan suatu hari raya, maka komunitas Muslim akan mengunjunginya untuk mengapresiasi perayaan yang diselenggarakan oleh non-Muslim tersebut.

Update selanjutnya terkait kesatuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sikap toleransi dan saling menghargai yang menjadikan Masyarakat semakin kuat dan erat dibandingkan saling memecah belah dan memfitnah. Kehadiran non-Muslim di sekitar desa tidak membuat komunitas Muslim khawatir atau cemas, namun merupakan hal yang lumrah dan nyaman, serta dapat diterima secara terbuka. Memang warga Desa Pancasila sudah terbiasa dan mampu berintegrasi dengan komunitas non-Muslim. Hingga saat ini, belum ada konflik besar terkait masalah agama. Saat itu, untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul di sekitar Desa Pancasila, sanksi sosial yang disepakati kedua belah pihak akan diutamakan. Nilai dikembangkan selanjutnya dalam kaitannya dengan pertimbangan. Hal ini ditunjukkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Desa Pancasila seperti: 4.444 pertemuan desa yang diselenggarakan oleh desa-desa yang ada, pertemuan pertukaran bulanan, diskusi tingkat nasional dan diskusi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan dan menyusun peraturan terkait desa Pancasila. memesan. Salah satunya terkait peraturan yang melarang pemasangan baliho, spanduk, dan spanduk politik bagi bakal calon, baik secara nasional maupun di Kawasan Istimewa Yogyakarta, sekitar Desa Pancasila. Aturan-aturan tersebut hanya berbentuk lisan saja, namun dalam proses diskusi disosialisasikan dan sampai saat ini aturan-aturan tersebut masih dipertahankan dan masyarakat dapat secara sadar dan sadar menaatinya dengan tertib guna mewujudkan desa Pancasila yang bersih, tertib dan nyaman. Kemudian, pengembangan nilai-nilai keadilan dapat dilihat dari perspektif kesetaraan tanpa membedakan ekonomi, status sosial, dan kelas sosial. Sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan tanpa adanya konflik antar manusia. Contoh nyata yang dapat menunjukkan dengan baik nilai keadilan sosial adalah masyarakat yang netral secara politik. Masyarakat bersikap netral terhadap pilihan yang didukungnya, pendukungnya tidak menjelek-jelekkkan partai politik lain.

Dinamisme Pancasila dapat terwujud apabila adanya refleksi mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghayati dan memilih nilai-nilai kehidupan yang baik dan sesuai untuk menjadi pedoman hidup bangsa guna melestarikan kehidupan di masa depan. Sedangkan penerimaan atau penolakan terhadap nilai-nilai budaya asing didasarkan pada relevansinya. Dalam konteks hubungan internasional dan perkembangan ideologi, Pancasila tidak hanya menyerap atau dipengaruhi oleh nilai-nilai asing, namun nilai-nilai Pancasila dapat diusulkan, dipengaruhi dan didukung oleh budaya atau ideologi lain. Bahkan

Soerjanto Poespowardjo (1989: 14) menjelaskan bahwa dinamika yang ada dalam perwujudan Pancasila memungkinkan Pancasila juga muncul sebagai alternatif untuk memperkuat tatanan kehidupan internasional, dan menjadi pedoman bagi negara-negara maju pada khususnya, dan menjadi pedoman model warna. pertukaran antar negara pada umumnya.

Teori hipomorfisme Aristoteles mungkin mendukung pandangan ini. Aristoteles menunjukkan bahwa meskipun materi (hyle) menjadi nyata ketika ia mengambil bentuk (form), materi tidaklah pasif. Artinya dalam setiap realitas ada gerak yang wujudnya (berdasarkan materi) dapat pula menjadi materi bagi wujud lain, sehingga setiap realitas mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang ada bukanlah perubahan yang baru melainkan merupakan perubahan yang bertahan lama. Artinya realisasi masa kini didasarkan pada realitas yang ada di masa lalu dan terbuka terhadap perubahan di masa depan. Dalam hal ini warga berperan sebagai unsur cadangan dan pendukung. Memang permasalahan yang terjadi di negeri ini tidak hanya sebatas permasalahan pertahanan dan keamanan yang ditangani oleh TNI dan Polri saja, namun sudah menjadi tanggung jawab masyarakat untuk selalu memperhatikan upaya ikut serta menjaga negara. secara umum peran masyarakat dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dengan memberikan keteladanan, sikap, perilaku dan sikap yang baik untuk mencerminkan warga negara Pancasila serta pandangan-pandangan yang ada dalam Pancasila. Selain itu, peran masyarakat dalam pembangunan juga sangat penting dalam upaya menyebarkan pengaruh baik Pancasila kepada generasi muda di sekitar wilayah kampung Pancasila di desa Tirenggo.

Masyarakat menjadi contoh bagi warga desa lain untuk menerapkan sikap Pancasila, saling menghormati (toleransi), gotong royong, pertimbangan matang, dan penerapan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Peran pemuda dalam upaya pengembangan nilai-nilai Pancasila masih sebatas mengikuti dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan belum ada terobosan atau inovasi yang dapat mendukung upaya pengembangan nilai-nilai Pancasila di desa agar semakin populer. dan tersebar luas. mempunyai kualitas yang lebih baik. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan ditegaskan bahwa peran pemuda adalah sebagai pemberi kekuatan moral, kemampuan mengendalikan masyarakat, dan menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, pemuda mempunyai tanggung jawab yang besar dalam upaya pembangunan bangsa, menjaga NKRI dan menjaga keutuhan Pancasila. Namun pada kenyataannya, generasi muda garda terdepan dalam membela dan mendirikan bangsa sangat rentan terhadap tantangan moral, yang akan berdampak semakin melemahnya kualitas moral bangsa di kemudian hari. Artinya, generasi muda yang mengemban tanggung jawab

memimpin negara di masa depan dapat menjadi solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan negara ini agar mampu berprestasi sebagai pionir yang handal, handal dalam memberikan solusi terbaik, dan mempunyai sikap yang tangguh. dan memiliki jiwa nasionalis untuk menjawab tantangan zaman yang semakin berkembang (Suryaningrat, 2019).

Menunjukkan cinta Pancasila yang sejati dapat dilakukan dengan khusyuk pada setiap pembelajaran di sekolah. Hal tersebut kemudian diterapkan pada sistem sosial dan bentuk material berupa kebudayaan dalam kehidupan manusia (Kaelan, 2013). Salah satunya adalah Desa Pancasila yang dapat dijadikan sebagai cara tepat untuk menghidupkan kembali nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila (Koran Sindo, 2019). Apabila Pancasila benar-benar dipahami, dihayati, dihayati, dan diamalkan secara mandiri, jujur, dan benar dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam upaya memimpin gerakan reformasi yang bertujuan mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Pancasila ke depan dapat menjadi perekat dan pemersatu keberagaman bangsa Indonesia (Adi, 2016). Kajian yang dilakukan Wulandari (2018) menyatakan bahwa penanaman nilai-nilai Pancasila pada masyarakat Amak-Arak Kampung Muslim Kepaon ditanamkan melalui nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama. Sedangkan penelitian yang dilakukan Damanhuri (2016) menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila di Kampung Pancasila Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Provinsi Banten dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Tujuan penerapan nilai-nilai Pancasila adalah sebagai upaya pembentukan jati diri bangsa. Dalam proses implementasinya, penerapan nilai-nilai Pancasila belum banyak mendapat dukungan dari masyarakat dan kurangnya kesadaran terhadap perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Perkembangan ideologi Pancasila saat ini menghadapi permasalahan terkait fenomena sosial dan dinamika ideologi. Era saat ini menunjukkan kebangkitan kebebasan berbahaya, berpotensi mengancam ketahanan ideologi. Beberapa faktor yang dapat melemahkan ketahanan ideologi Pancasila bersumber dari realitas keberagaman, baik budaya, suku, bahasa, atau agama. Hal tersebut diwujudkan dengan munculnya sikap-sikap intoleransi, primordialisme, dan sikap egoisme yang sangat besar terhadap sesama (Maharani, 2019). Dalam konteks di Negara Indonesia, ancaman, tantangan, dan hambatan turut mengalami pergeseran.

Ancaman dan hambatan yang dihadapi bangsa Indonesia bukan lagi agresi militer dan gencatan senjata antar bangsa namun permasalahan yang ada saat ini lebih banyak berkaitan dengan kolonialisme ideologi dan politik, ekonomi dan sosial

budaya (Febrihananto, 2017). Hambatan dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila dibedakan menjadi dua macam, yaitu hambatan yang bersifat pribadi atau hambatan yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Kendala kemudian dapat diartikan sebagai kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan nilai-nilai Pancasila.

Kendala individu yang dihadapi masyarakat luas adalah mereka yang terkadang acuh tak acuh terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai Pancasila. Memang setelah dicanangkan desa Pancasila, masyarakat hanya mengenal desa Pancasila dari mulut ke mulut. Sedangkan sosialisasi lebih lanjut tentang desa Pancasila telah dilakukan berkali-kali, namun seiring berjalannya waktu, pelatihan atau sosialisasi tentang desa Pancasila semakin jarang dilakukan sehingga masyarakat belum mengetahui dan kurang begitu memahami tentang desa Pancasila. total. Namun sebagian besar masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela dengan kesadaran penuh untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat sudah sejak lama terbiasa hidup rukun, toleran, menghargai orang lain dan selalu mengedepankan pertimbangan, sehingga menjadikan masyarakat lebih terbuka dan memahami nilai-nilai Pancasila tanpa harus mencaci-maki para tetua adat. Karena sekarang menjadi bagian dari masyarakat sendiri, tidak ada pamrih, masyarakat memahami dan melaksanakannya. Hal ini tidak lepas dari adanya sejumlah kegiatan yang mendukung upaya pengembangan nilai-nilai Pancasila, seperti musyawarah tingkat desa, musyawarah masyarakat, paguyuban warga bulanan, musyawarah nasional, semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan pembangunan Pancasila. nilai-nilai.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah meningkatkan kesadaran bahwa nilai-nilai Pancasila tidak boleh luntur meski tren globalisasi semakin menguat. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dapat mempertebal kecintaan kita terhadap Pancasila dan juga terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga menjadi aturan yang mengikat bangsa Indonesia untuk tidak menyimpang dari pencapaian tujuan nasional dan negara apapun.

Pemutakhiran nilai-nilai Pancasila harus selalu inovatif. Hakikat inovasi adalah perbaikan dari dalam dan melalui sistem yang ada. Pada hakikatnya, setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan di semua tingkatan yang bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila (mengubah kategori tematik menjadi kategori wajib), harus terbuka untuk dilakukan perubahan, peninjauan kembali nilai atau pengkajian hubungannya dengan nilai-nilai inti Pancasila.

Untuk menjaga konsistensi dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu dilakukan formalisasi Pancasila secara abstrak, umum, dan universal. Hal ini dapat diubah menjadi resep Pancasila yang umum dan umum, atau bahkan menjadi Pancasila individu yang spesifik. Artinya Pancasila menjadi ciri khas pelaku kelompok dan individu, sehingga menjadi motivasi bagi segala perilaku dalam lingkungan aktualnya baik dalam ranah bernegara, politik, maupun individu.

Dinamisme Pancasila dapat terwujud apabila adanya refleksi mendalam dan keterbukaan yang matang untuk menyerap, menghayati dan memilih nilai-nilai kehidupan yang baik dan sesuai untuk menjadi pedoman hidup bangsa guna melestarikan kehidupan di masa depan. Sedangkan penerimaan atau penolakan terhadap nilai-nilai budaya asing didasarkan pada relevansinya. Dalam konteks hubungan internasional dan perkembangan ideologi. Pancasila tidak hanya menyerap atau dipengaruhi oleh nilai-nilai asing, tetapi nilai-nilai Pancasila dapat diusulkan dan dipengaruhi, mendukung budaya atau ideologi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- , 1975. Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- , 1984 (Cet.Keenam). Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- , 1995/1996. "Masalah Filsafati dan Ideologi dalam Membangun Negara Hukum di Indonesia", dalam Majalah Mimbar No. 74 tahun XIII.
- , 1993 (Cet.ke-12). Filsafat Manusia. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Abdulkadir Besar. 1994. Pancasila dan Alam Pikiran Integralistik (Kedudukan dan Perannya dalam Era Globalisasi). Yogyakarta: Panitia Seminar "Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi" 16-17 November 1994 di UGM.
- Bachtiar, Harsja W. (Peny.). 1976. Percakapan dengan Sidney Hook tentang Masalah Filsafat. Jakarta: Jambatan.
- Bakker, Anton. 1992. Ontologi atau Metafisika Umum. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Bertens. Kess. 1976. Ringkasan Sejarah Filsafat. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Bracher, Karl Dietrich. 1984. The Age of Ideologies. New York: St.Martin's Press.
- Damardjati Supadjar. 1990. Konsep Kefilsafatan tentang Tuhan Menurut Alfred Nort Whitehead. Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.
- Dibyasuharda. 1990. Dimensi Metafisik dalam Simbol: Ontologi mengenai Akar Simbol. Yogyakarta: Disertasi Doktor di UGM.
- Driyarkara, N. 1959. Pancasila dan Religi. Yogyakarta: Makalah disampaikan pada

- Seminar Pantjasila I di Yogyakarta tanggal 16 sampai 20 Februari.
- Habermas, Jurgen.1990. Ilmu dan Teknologi sebagai Ideologi. Jakarta: LP3ES.
- Habib Mustopo, M.1992. Ideologi Pancasila dalam Menghadapi Globalisasi dan Era Tinggal Landas. Bandungan-Ambarawa: Panitia Seminar dan Loka Karya Nasional MKDU Pendidikan Pancasila Dosen-dosen PTN/PTS dan Kedinasan Pada tanggal 29 – 30 September 1992.
- Hardono Hadi, P. 1994.Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Kansil, C.S.T.1971. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kattsoff, Louis O.1953. Elements of Philosophy. New York: The Ronald Press Comp.
- Kendall, G.A. 1981. "Ideology: An Essay in Definition" dalam majalah Philophy Today No.25, hal. 262.
- Koento Wibisono. 1988. Pancasila Ideologi Terbuka. Magelang: Panitia Temu Karya Dosen-Dosen PTN Se-Jawa Tengah dan Kopertis Wil.VI.
- Leahy, Louis. 1993. "Ideologi Tinjauan Historis dan Kritis". Yogyakarta: dalam Majalah Basis No.42, halaman 130 – 135.
- Liek Wilardjo. 1990.Realita dan Desiderata. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Lorens Bagus. 1991. Metafiska. Jakarta: PT Gramedia.
- Magnis Suseno, Franz. 1991. Berfilsafat dari Konteks. Jakarta: PT Gramedia.
- Mannheim, Karl. 1991. Ideologi dan Utopia (Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik). Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Moerdino. 1995/1996. "Pancasila sebagai Ideologi Terbuka Menghadapi Era Globalisasi dan Perdagangan Babas", dalam Majalah Mimbar No.75 tahun XIII.
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdence. 1990. Megatrends 2000 (Sepuluh Arah Baru untuk Tahun 1990-an). Jakarta: Bina Rupa Aksara.
- Notonagoro. 1974 (Cet.Kelima). Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Popkin, Richard, dan Avrum Stroll. 1958. Philosophy Made Simple. New York: Made Sample Books, Inc.
- Pranarka A.M.W. 1985. Sejarah Pemikiran tentang Pancasila. Jakarta: CSIS.
- Sartono Kartodirdjo. 1990. Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sastrapratedja,M. 1996. Pancasila dan Globalisasi. Magelang: Panitia Seminar Nasional Pendidikan Pancasila di Universitas Tidar pada 29-31 Juli 1996.
- Slamet Sutrisno. 1986. Pancasila sebagai Metode. Yogyakarta: Liberty.
- Snyder, Louis L. 1954. The Meaning of Nationalism. New Brunswick-New Jersey: Rutger University Press.

- Soedjati Djiwandono, J. 1995. *Setengah Abad Negara Pancasila (Tinjauan Kritis ke Arah Pembaharuan)*. Jakarta: CSIS.
- Soerjanto Poespowardojo. 1989. *Filsafat Pancasila*. Jakarta: Gramedia. Sudarmanto, JB. 1987. *Agama dan Ideologi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sudarminta, J. 1991. *Filsafat Proses (Sebuah Pengantar Sistematis Filsafat Whitehead)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Suwarno, P.J. 1993. *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. Traer, Robert. 1991. *Faith in Human Rights*. Washington DC: Georgetown Univ.Press. Whitehead, Alfred North. 1979. *Process and Reality*. New York: The Free Press. William Ebenstein & Edwin Fogelman. 1985. *Today's Isms*. London: Prentice-Hall,Inc.